MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1713 /SEK/OT1.6/VII/2026 Jakarta, 27 Juli 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Revisi Dokumen SAKIP Tahun 2026 di Lingkungan Peradilan Militer

Yth. 1. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi;
2. Para Kepala Pengadilan Militer.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19/KMA/SK.OT1.1/I/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/KMA/SK.OT1.1/II/2025 Tentang Nama, Kelas, Tipe, Lokasi, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan ini disampaikan bahwa diperlukan adanya penyesuaian dokumen SAKIP Tahun 2026 pada satuan kerja di lingkungan peradilan militer sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
   a. Pengadilan Militer yang baru diresmikan operasionalnya, menyusun Renstra Tahun 2025 – 2029 disesuaikan dengan tahun diresmikan operasional kantor;
   b. Pengadilan Militer yang mengalami perubahan nomenklatur, melakukan reviu Renstra Tahun 2025-2029 yang menghasilkan dokumen revisi Renstra Tahun 2025 – 2029.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029
   a. Pengadilan Militer yang baru diresmikan operasionalnya, menetapkan IKU Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
   b. Pengadilan Militer yang mengalami perubahan nomenklatur, melakukan reviu IKU Tahun 2025-2029 yang menghasilkan dokumen revisi IKU Tahun 2025 – 2029.

3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
   a. Pengadilan Militer yang baru diresmikan operasionalnya, menyusun RKT Tahun 2026 dan Tahun 2027;
   b. Pengadilan Militer yang mengalami perubahan nomenklatur, melakukan reviu RKT Tahun 2026 dan Tahun 2027 yang menghasilkan dokumen revisi RKT Tahun 2026 dan Tahun 2027.
4. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
   a. Pengadilan Militer yang baru diresmikan operasionalnya, menyusun PKT Tahun 2026;
   b. Pengadilan Militer yang mengalami perubahan nomenklatur, melakukan reviu PKT Tahun 2026 yang menghasilkan dokumen revisi PKT Tahun 2026.
5. Rencana Aksi atas PKT
   a. Pengadilan Militer yang baru diresmikan operasionalnya, menyusun Rencana Aksi Tahun 2026;
   b. Pengadilan Militer yang mengalami perubahan nomenklatur, melakukan reviu Rencana Aksi Tahun 2026 yang menghasilkan dokumen revisi Rencana Aksi Tahun 2026.
6. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi
   a. Pengadilan Militer yang baru diresmikan operasionalnya, menyusun Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan III - IV Tahun 2026 berdasarkan PKT 2026;
   b. Pengadilan Militer yang mengalami perubahan nomenklatur, melakukan reviu Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I - IV Tahun 2026 berdasarkan Revisi PKT 2026 yang menghasilkan dokumen revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I - IV Tahun 2026 berdasarkan Revisi PKT 2026.

Seluruh dokumen SAKIP tersebut disampaikan paling lambat tanggal 1 September 2026 melalui:

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link https://esr.menpan.go.id/.
2. Aplikasi e-SAKIP BATARA pada link https://batara.mahkamahagung.go.id/.
3. Website masing-masing Satuan Kerja.

Bila diperlukan informasi lebih lanjut maupun akun pengguna aplikasi e-SAKIP REVIU dan e-SAKIP BATARA dapat menghubungi Sdr. Achmad (085718000368).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
2. Kepala Badan Urusan Administrasi

LAMPIRAN I
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor :1713/SEK/OT1.6/VII/2026
Tanggal :27 Juli 2026

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....(1)
.....(2)

NO	SASARAN .....(3)	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	.....	1.				
		2.				

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				

NO	SASARAN .....(3)	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	.....	1.				
		2.				

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				

..... (4)
.....(5)
.....(6)

(.....)(7)

Petunjuk Pengisian:
(1) Tahun Berjalan
(2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
- Mahkamah Agung
- Unit Eselon I
- Pengadilan Tingkat Banding
- Pengadilan Tingkat Pertama

(3) Sesuai dengan Entitas Akuntabilitas
- Sasaran Strategis untuk Mahkamah Agung
- Sasaran Program untuk Unit Eselon I
- Sasaran Kegiatan untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

(4) Lokasi Penetapan
(5) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
(6) Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja
- Sekretaris Mahkamah Agung
- Kepala Unit Eselon I
- Ketua Pengadilan Tingkat Banding
- Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

(7) Nama Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja

LAMPIRAN II
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 1713/SEK/OT1.6/VII/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN ..... (1) TRIWULAN I/II/III/IV

.....(2)

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	.....	1.			
		2.			

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	.....	1.			
		2.			

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT

Petunjuk Pengisian:
(1) Tahun Pelaksanaan Kinerja
(2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
- Unit Eselon I
- Pengadilan Tingkat Banding
- Pengadilan Tingkat Pertama

(3) Lokasi Penetapan
(4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
(5) Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja
- Kepala Unit Eselon I
- Ketua Pengadilan Tingkat Banding
- Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

(6) Nama Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja